



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019 – 2024
(REVISI)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selama periode tahun 2019-2024 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas dan dukungan anggaran. Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun program-program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung selama 5 tahun (2019-2024) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada setiap tahun anggaran dalam periode 2019-2024.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah terlibat memberikan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang perkebunan.

Bandar Lampung, Januari 2022
Plt. Kepala Dinas

Ir. JABUK, MTA
Pembina Tk. I
NIP. 196412041992031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud Dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12
2.2. Sumber Daya OPD	14
2.3. Kinerja Pelayanan OPD.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.	20
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24
3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	34
3.5. Penentuan Isu–isu Strategis	36
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII. PENUTUP	88
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2020 6
Tabel 2	Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 14
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 15
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 18
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi 19
Tabel 6	Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2019 - 2024 21
Tabel 7	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019 - 2024 28
Tabel 8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2014 - 2019 29
Tabel 9	Lokasi Pengembangan Kawasan Perkebunan di Provinsi Lampung 35
Tabel 10	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 42
Tabel 11	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 45
Tabel 12	Rencana Program Kegiatan dan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2020 48
Tabel 13	Rencana Program Kegiatan dan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2024 58
Tabel 14	Indikator Kinerja Perangkat Daerah 85
Tabel 15	Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2020-2024 86
Tabel 16	Proyeksi Produktivitas Komoditi Unggulan Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) Provinsi Lampung 2020 -2024 86
Tabel 17	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2019 – 2024 87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan menuju bangsa dan negara unggul tahun 2045 harus mencakup semua sektor secara proporsional, termasuk sektor pertanian. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan di sektor pertanian, baik yang bersumber dari sisi domestik maupun global, harus dihadapi secara cermat, dengan tetap mengedepankan tujuan mencapai kemandirian bangsa. Seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki bangsa harus disinergikan untuk memanfaatkan semua peluang yang ada secara efektif, demi kemajuan dan peningkatan daya saing bangsa.

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Posisi strategis tersebut memberikan banyak implikasi positif terhadap prospek pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung, termasuk sub sektor perkebunan. Implikasi tersebut antara lain dari aspek mobilitas sumber daya, peningkatan produksi dan nilai tambah produk, pemasaran produk, kerjasama bisnis, dan lain lain. Oleh karena itu, potensi strategis tersebut harus diekplorasi dengan cermat pemanfaatannya oleh semua pihak dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian dikenal memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dari peran sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan bahan pangan dan energi,

ketersediaan bahan baku industri, serta peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kontribusi sektor pertanian terhadap perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 29,90% (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024). Oleh karena itu, peran sektor pertanian harus terus diperkuat sehingga semakin berperan dalam pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 merupakan rumusan pernyataan tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan; Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, selain data tentang pertumbuhan ekonomi diperlukan pula data pendukung disektor pertanian. Dengan tersedianya data yang lengkap dan aktual disektor pertanian, akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan dibidang pertanian dapat digunakan Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa

yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.

Rencana Strategis akan menjadi panduan arah suatu organisasi untuk tahun ke depan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara melaksanakannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerjanya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perkebunan yang dievaluasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melalui Revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 agar selaras dengan arah kebijakan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020) tersebut di atas.

Gambaran Umum Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan meliputi Perkebunan Besar Negara (5,26%), Perkebunan Besar Swasta (43,26%) dan Perkebunan Rakyat (51,48%) (Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2018).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan

tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Provinsi Lampung merupakan sentra beberapa komoditi perkebunan di Indonesia diantaranya kopi robusta, kakao, lada dan tebu. Menurut data statistik Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019, komoditi kopi robusta di Provinsi Lampung mempunyai luas areal terluas ke 2 nasional dengan luas 156.959 hektar dan produksi terbesar ke 2 secara nasional dengan jumlah produksi 117.111 ton. Komoditas lada menempati urutan ke 2 secara nasional dengan luas 45.848 hektar dan produksi ke 2 secara nasional dengan jumlah produksi 14.730 ton. Komoditas kakao menempati urutan ke 7 secara nasional dengan luas areal sebesar 79.356 hektar dan produksi ke 5 secara nasional dengan jumlah produksi 58.852 ton. Kemudian untuk tanaman tebu, menempati urutan ke 3 secara nasional dengan luas 28.813 hektar dan produksi ke 2 secara nasional dengan jumlah produksi 181.171 ton.

Di lingkup regional Sumatera, nilai tukar petani Provinsi Lampung sampai pada tahun 2020 berada di peringkat ke-2 terendah. NTP Provinsi Lampung dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 95,85.

TABEL I Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2020

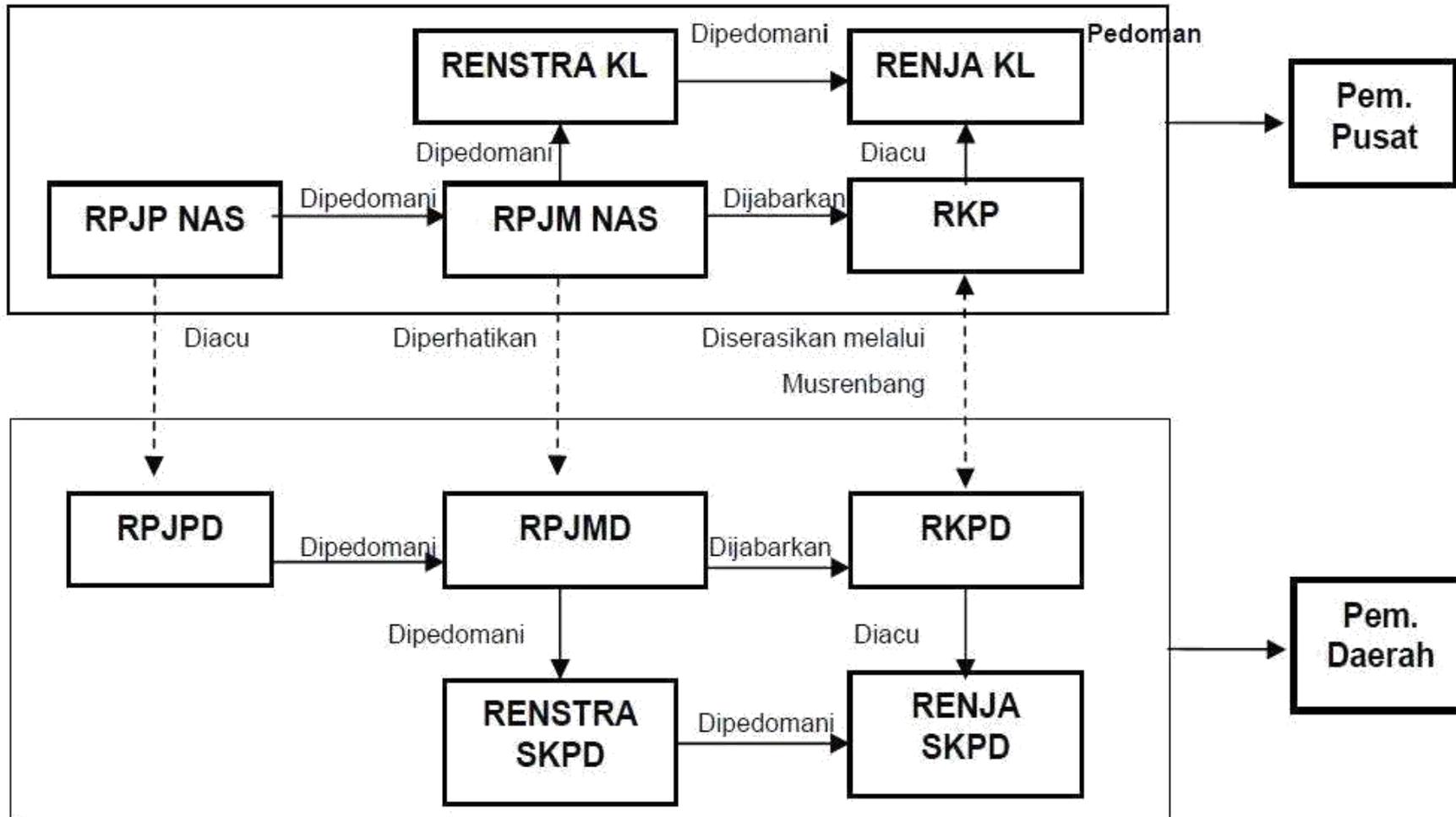
Provinsi	Nilai Tukar Petani (NTP)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	98.15	96.64	96.27	94.74	94.73	101.09	98,01
Sumatera Utara	100.08	98.61	100.18	99.39	97.98	98,08	109,83
Sumatera Barat	100.60	97.74	98.90	96.97	95.31	103,4	100,59
Riau	96.94	95.24	98.68	102.97	97.97	123,93	118,79
Kepulauan Riau	100.93	99.45	98.16	97.54	96.5	101,38	99,19
Jambi	97.02	95.43	98.59	100.78	99.48	110,47	107,62
Sumatera Selatan	100.89	96.87	94.58	95.03	93.61	100,64	95,37
Kepulauan Bangka Belitung	101.56	104.70	101.43	95.79	86.88	105,92	103,95
Bengkulu	96.33	93.92	93.06	94.49	94.01	116,71	114,1
Lampung	104.18	103.17	103.90	105.16	105.84	101,97	95,85

Sumber: BPS, R.I, 2020, diolah

Kebijakan pengembangan integrasi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai bagian dalam upaya pencapaian Visi Gubernur Lampung dan pelaksanaan Misi 5 (lima) Gubernur Lampung sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada kurun waktu 2019-2024 dan memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode tersebut dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

Gambar 1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi;
10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi Petani;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
21. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 adalah menetapkan kembali prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima (5) tahun ke depan melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sesuai dengan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, penyusunan Revisi Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategi 5 (lima) tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dibuat sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan perkebunan pemerintah daerah Provinsi Lampung serta merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan program pembangunan perkebunan lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu–isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;

- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- 3. Bidang Produksi;
 - a. Seksi Tanaman Tahunan
 - b. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
 - c. Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya
- 4. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - a. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 5. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
 - b. Seksi Perbenihan
 - c. Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
- 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Lampiran.

2.2. Sumber Daya OPD

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT (orang)	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 113	S3 : 0	IV/d : 1	Ess IV = 24	POPT : 3
PTHL : 15	S2 : 30	IV/c : 0	Ess III = 8	PBT : 6
	S1 : 46	IV/b : 10	Ess II = 1	PMHP : 9
	Diploma : 6	IV/a : 11	Pelaksana = 81	APHP : 3
	SLTA : 31	III/d : 25		
	SLTP : 0	III/c : 15		
	SD : 0	III/b : 14		
		III/a : 18		
		II/d : 13		
		II/c : 3		
		II/b : 2		
		II/a : 0		
		I/d : 2		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		

(Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Perkebunan, 2021)

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Nomor	Keterangan	Jumlah Unit	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Mobil	5	5	-
2.	Note Book	16	16	-
3.	Personal Computer (PC)	63	55	8
4.	Air Conditioner (AC)	43	42	1
5.	Kursi lipat	364	98	266
6.	Kursi Rapat	82	38	44
7.	Meja Biro	42	37	5
8.	Genset	2	2	-
9.	Meja Rapat	21	7	14
10.	Gedung	4	3	1
11.	Lemari Gantung	4	4	-
12.	Lemari Buku	2	2	-
13.	Pompa Air/tanki	2	2	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menurut sudut pandang makro ekonomi, salah satu kegiatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi Lampung adalah sub sektor Perkebunan. Perannya sebagai penyedia pangan masyarakat; sumber pendapatan; penyumbang terhadap pertumbuhan PDRB; penyumbang dan penghasil devisa Negara; mendorong pengembangan wilayah; penyedia lapangan kerja; memperbaiki lingkungan/ekosistem.

Kegiatan tersebut merupakan faktor yang mendinamisasi keseimbangan pendapatan nasional dan selanjutnya pendapatan nasional yang dinamis dan berkembang akan lebih mendorong masuknya penanam

modal untuk melakukan investasi. Di sisi lain, menurut sudut pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan keuntungan/laba.

Kinerja Perkebunan

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang tujuannya mendorong tumbuh kembangnya usaha perkebunan di Indonesia, baik melalui perusahaan besar Negara (PBN), perusahaan swasta (PBS) maupun masyarakat (Perkebunan Rakyat/ PR) dengan sendiri, kerja sama maupun pinjaman. Dengan adanya pengembangan perkebunan diharapkan akan memacu perekonomian nasional dan pengentasan daerah tertinggal.

Pengembangan sektor perkebunan akan lebih optimal apabila dalam pelaksanaan kegiatan lebih terfokus. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional diharapkan pembangunan Subsektor Perkebunan lebih tepat sasaran.

Kawasan tebu di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kawasan kopi robusta berada di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara. Kawasan lada di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus. Kawasan kakao di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Utara. Kawasan karet di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan kelapa di Provinsi Lampung yaitu kabupaten Lampung Selatan.

Berkembangnya perkebunan di suatu daerah mempunyai peran yang penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Peran tersebut adalah:

1. Membuka lapangan usaha baru dalam berusaha;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan devisa Negara;
4. Memperbaiki lingkungan ekosistem;
5. Investasi sektor perkebunan yang merupakan penggerak pertumbuhan PDRB sub sektor Perkebunan dimana makin tinggi investasi maka makin besar pertumbuhan PDRB sektor perkebunannya;

Paradigma peranan perkebunan baik dari sudut pandang makro maupun mikro menuntut suatu perencanaan yang akurat, sistematis, terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses tersebut merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan atau kebijakan, dengan adanya perencanaan pengembangan perkebunan dan kebijakan yang tepat diharapkan dapat memacu tumbuhnya usaha perkebunan di daerah, sehingga memberi dampak positif terhadap perkembangan daerah itu sendiri.

Kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung dalam periode 2014-2019 masih belum maksimal dan masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan diantaranya: (1) produktivitas tanaman secara umum masih di bawah produktivitas teknis antara lain disebabkan penerapan budidaya tanam (GAP) yang belum intensif, penambahan tanaman tua dan tanaman rusak, serangan OPT, penggunaan benih yang tidak bermutu dan bersertifikat, (2) penurunan daya dukung lahan baik secara kuantitas maupun kualitas lahan, (3) minimnya sarana dan prasarana pendukung produksi seperti alat mesin pertanian dan pemanfaatan sumber-sumber air di lahan perkebunan, (4) belum optimalnya nilai tambah karena umumnya produk dalam bentuk raw material, (5) kualitas mutu hasil yang belum optimal, dan (6) lemahnya kelembagaan tani.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (TABEL T-C.23)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	661.690	651.208	653.813	656.429	659.054	661.690	594.632	614.739	627.328	672.981	848.773	91,31	94,02	95,56	102,11	128,27

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Dinas Perkebunan (BL)	10.581.606.847	6.177.864.500			9.680.883.764	5.512.565.296			91,49	89,23			0,24	0,21
Dinas Perkebunan dan Peternakan (BL)			15.488.000.000	9.891.902.580			14.408.787.462	6.715.916.194			93,03	67,89		

Indikasi geografis merupakan perlindungan hukum terhadap suatu produk yang spesifik pada wilayah tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2016, Provinsi Lampung telah mendapatkan sertifikat Indikasi geografis untuk 2 komoditi yaitu:

1. Kopi Robusta Lampung (Lampung Robusta Coffee) tahun 2014.

Meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus dan Way Kanan, dengan keanggotaan Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL) terdiri dari:

- produsen gelondong merah (Total 420 KT 19.586 Ha, Lampung Barat 299 KT 10.020 Ha, Tanggamus 48 KT 9.063 Ha, Way Kanan 73 KT 363 Ha)
- produsen kopi luwak robusta (Total 14 orang, Lampung Barat 12 orang Tanggamus 2 orang)
- penyangrai dan pembubuk kopi, pedagang, pembina, pengarah dan tenaga ahli.

2. Lada Hitam Lampung (Lampung Black Pepper) tahun 2016

Meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Barat, dengan keanggotaan Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung (MIG-LHL) terdiri dari:

- Produsen lada hitam (Total 168 KT 3.608,75 Ha, Lampung Utara 50 KT 1.036 Ha, Lampung Barat 36 KT 1.158 Ha, Tanggamus 114 KT 478 Ha, Lampung Timur 69 KT 936,75 Ha.
- Pedagang
- Pelindung, Pembina dan tenaga ahli.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sub sektor perkebunan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

PDRB Provinsi Lampung. Upaya peningkatan PDRB sub sektor perkebunan ini adalah melalui peningkatan produksi komoditi perkebunan, khususnya perkebunan rakyat (PR) yaitu komoditi kopi, lada, kakao, kelapa dalam, karet, kelapa sawit, dan tebu.

Tabel 6. Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	2,5 - 3,5	3 - 4	3,5 - 4,5	4,5 - 5,5

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Untuk mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memiliki tantangan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi perkebunan dengan optimalisasi lahan, antara lain upaya mengembalikan daya dukung lahan yang mengalami penurunan baik kualitas (kesuburan) dan kuantitas (peralihan fungsi lahan).
2. Perlu peningkatan prasarana dan sarana pendukung dalam peningkatan produksi perkebunan antara lain penyediaan jalan produksi, sumber daya air.
3. Tren pasar global yang mensyaratkan jaminan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan, sehingga perlu disikapi dengan mulai diterapkannya Standar Teknis Budidaya Tanaman secara menyeluruh di tiap sentra produksi, untuk itu perlu ditingkatkan SDM baik petugas maupun pelaku utama perkebunan serta mengoptimalkan fungsi kelembagaan tani.
4. Perlunya penetapan sentra pengembangan komoditas unggulan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung antara lain:

1. Telah terbitnya Kepmentan Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, yang mengatur penetapan kawasan pertanian. Diharapkan program pembangunan baik kabupaten, provinsi dan nasional disesuaikan dengan kawasan yang ditetapkan, sehingga produksi perkebunan dapat mencapai target yang direncanakan.
2. Untuk keselarasan dengan Pusat, maka perlu dukungan daerah dengan penetapan kawasan perkebunan unggulan dengan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota khususnya wilayah sentra komoditas sehingga upaya peningkatan produksi dapat lebih optimal.
4. Menyusun dan menerapkan Master Plan pengembangan perkebunan yang dilanjutkan dengan Rencana Aksi di tingkat kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
5. Sejak tahun 2019, telah disusun dokumen masterplan komoditas tebu dan masterplan komoditas lada.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Produksi
 - a. Kapasitas produksi tanaman yang belum optimal per satuan tanaman dan satuan luas;
 - b. Masih tingginya kehilangan hasil tanaman akibat serangan OPT;
 - c. Ketersediaan sumber benih bermutu yang belum mencukupi kebutuhan;
 - d. Penurunan daya dukung lahan baik secara kuantitas maupun kualitas lahan akibat alih fungsi dan konversi lahan (tantangan untuk meningkatkan nilai ekonomi per satuan lahan);
 - e. Meningkatnya populasi tanaman tua dan tanaman rusak.

2. Mutu dan Harga
 - a. Minimnya nilai tambah dan daya saing produk karena kualitas dan mutu hasil belum optimal;
 - b. Tren penurunan harga komoditas di pasar global.

3. Prasarana dan Sarana

Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pendukung produksi seperti jalan produksi dan pemanfaatan sumber-sumber air di lahan perkebunan, serta saprodi lainnya.

4. SDM dan Kelembagaan

- a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani;
- b. Akses petani kepada lembaga pembiayaan masih rendah;
- c. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia perlu ditingkatkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi Lampung menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025 dan visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Pada periode Renstra Tahun 2019-2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Visi Gubernur Lampung yang terdapat didalam RPJMD Provinsi Lampung dimana Visi Gubernur Lampung adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1) Kehidupan masyarakat yang aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup

lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2) Kehidupan masyarakat yang berbudaya

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3) Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4) Kehidupan yang sejahtera

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu "LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025".

MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung, yaitu:

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan :

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan indeks pertanaman serta untuk pengendalian banjir;

2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk Komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
3. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
4. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
5. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan *partnership* dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
6. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi serta program magang;
8. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Pekerja.

Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi. Berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai penjabaran dari Misi RPJMD 2019-2024:

Tabel 7. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Kelima : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian dan hilirisasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI

Dalam Dokumen Revisi Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi misi tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun ke depan (**Tabel 8**).

Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan pangan strategis dalam negeri 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 5. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Kelembagaan pertanian nasional 8. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Visi Kementerian Pertanian

Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan visi yang harus diacu oleh kementerian/ lembaga yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

“Terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Peningkatan pendapatan petani dapat dicapai dengan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan serta kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri).
- Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian dapat diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini didukung beberapa misi, dimana misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya

Makna dari misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi misi Kementerian Pertanian, maka disusunlah sasaran strategis periode 2020 – 2024 dengan menggunakan metode *Balanced Scored* (BSC) dan Pendekatan empat perspektif (*stakeholders, customer, internal process, dan learning and growth perspective*) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Kelembagaan pertanian nasional
8. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sesuai dengan Renstra Revisi Kementerian Pertanian 2020-2024 program utama pembangunan perkebunan adalah Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Direktorat Jenderal Perkebunan) dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

VISI DITJEN PERKEBUNAN

“Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Produktif**, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
- **Bernilai tambah** berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
- **Berdaya saing** berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah:

“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkebunan 2024 maka dibutuhkan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan di dalam Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut:

“Terwujudnya Produk Hasil Perkebunan Nasional Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Sesuai Kepentingan Ekonomi Nasional”

Tujuan tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

- **Pertumbuhan nilai ekspor produk perkebunan nasional (%)**
Indikator ini menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Indonesia di luar negeri. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional merepresentasikan pertumbuhan ekonomi perkebunan nasional dari sisi pendapatan, dimana ekspor perkebunan menjadi faktor penentu meningkatnya ekspor pertanian nasional.
- **Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)**
Indikator ini menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional secara domestik. Hal ini berarti bahwa

semakin tinggi penurunan impor produk perkebunan nasional maka semakin tinggi nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional dibanding dengan produk impor sejenis. Selain itu indikator ini juga merepresentasikan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri atas komoditas perkebunan nasional.

- **Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien**

Indikator ini merepresentasikan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang profesional dan akuntabel, melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Nilai reformasi birokrasi yang semakin meningkat menandakan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dimana hal ini juga berarti meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah di Provinsi Lampung maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2019-2024 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-

wilayah tertinggal dan kota pusat pertumbuhan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada RPJM Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut, kawasan hutan lindung mencakup 9% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan rawan bencana 12,5% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan pertanian 18% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan perkebunan 27,3% dari luas wilayah provinsi Lampung, kawasan peruntukan industri 0,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan untuk permukiman 6,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung.

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Lampung mengacu Keputusan Menteri Pertanian No: 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Adapun beberapa komoditas dan lokasi pengembangan kawasan tercantum pada **Tabel 9.** berikut :

Tabel 9. Lokasi Pengembangan Kawasan Perkebunan di Provinsi Lampung

No	KOMODITAS	LOKASI
1	Tebu	1) Way Kanan 2) Lampung Utara 3) Lampung Tengah 4) Tulang Bawang Barat
2	Kopi	1) Tanggamus 2) Lampung Barat 3) Lampung Utara 4) Pesisir Barat
3	Kakao	1) Pesawaran 2) Lampung Timur

4	Lada	1) Lampung Timur 2) Lampung Utara 3) Way Kanan 4) Tanggamus
5	Kelapa	1) Lampung Selatan
6	Karet	1) Mesuji 2) Lampung Tengah

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Adapun isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Lampung saat ini adalah sebagai berikut:

1. Produksi dan produktivitas tanaman yang dibawah rata-rata produktivitas teknis sebagai akibat penerapan teknis budidaya (GAP) yang belum optimal, meningkatnya populasi tanaman tua dan tanaman rusak, kerusakan dan kehilangan hasil tanaman akibat serangan OPT, ketersediaan sumber benih yang terbatas dan penggunaan benih yang tidak bermutu dan bersertifikat. penurunan daya dukung lahan baik secara kuantitas (alih fungsi lahan) maupun kualitas (belum dilakukan konservasi);
2. Pendekatan pembangunan perkebunan ke depan melalui pola pendekatan kawasan;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi seperti Alsintan dan jaminan ketersediaan sumber-sumber air di lahan perkebunan;

4. Tuntutan standarisasi produk perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu penerapan pola budidaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
5. Adanya program nasional untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit yaitu kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat;
6. Kebijakan untuk mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan Lampung;
7. Mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kualitatif komoditas perkebunan Lampung;
8. Perlunya jaminan ketersediaan agroinput;
9. Perlunya memotong panjangnya rantai pemasaran produk;
10. Perlunya peningkatan kemitraan untuk perkebunan rakyat;
11. Pandemi Covid-19 yang berdampak negatif pada berbagai sektor (termasuk sub sektor Perkebunan) sejak tahun 2020 dan kemungkinan akan berdampak dalam jangka panjang.

Upaya optimalisasi potensi perkebunan dilakukan dengan pendekatan :

1. **Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan dengan pendekatan kawasan pengembangan dengan memperhatikan kesesuaian komoditas** dengan cara antara lain (1) melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani. (2) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur). (3) Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi lahan non perkebunan. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan perkebunan. (4) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal. (5) Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting

dan pengembangan sumber sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan.

2. **Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian** melalui
 - (1) pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usaha tani seperti penyediaan Alsintan dan jalan produksi.
 - (2) peningkatan sarana pertanian yang meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya, panen, pascapanen, pengolahan dan sarana pemasaran.
 - (3) penguatan kelembagaan dalam usaha budidaya pengolahan dan pemasaran perkebunan.
3. **Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit** melalui upaya
 - (1) memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
 - (2) menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar).
4. **Mendorong penguatan kelembagaan petani** melalui
 - (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani.
 - (2) memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun aspek pengolahan dan pemasaran.
5. **Meningkatkan akses informasi bagi petani baik pembiayaan, agroinput, harga dan pemasaran.**
6. **Mengembangkan pasar produk pertanian melalui pola kemitraan dengan dunia usaha.**
7. **Pengembangan melalui pendekatan kawasan sentra komoditas** dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan aspek ekonomis.

Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perkebunan Provinsi Lampung maka perlu dilakukan upaya hilirisasi produk perkebunan, dalam hal ini dengan melibatkan dunia usaha. Untuk itu perlu upaya dari semua pihak terkait untuk menarik investor serta dengan melengkapi dan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang ada. Selain itu perlu juga disiapkan

sumber daya manusia baik petugas, pekebun dan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan kemandirian pekebun dan masyarakat sehingga rencana hilirisasi perkebunan dapat berjalan optimal.

1. Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Inovasi teknologi pada pascapanen dan pengolahan hasil sangat strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis perkebunan. Melalui teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang tepat, dapat dicapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.

2. Kebijakan dan Regulasi

Pada situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat menentukan kemampuan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis perkebunan yang berdaya saing. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong pematapan sub sistem input produksi, efisiensi proses produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka usaha mewujudkan Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi 5 RPJMD pada point b yaitu Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menetapkan Tujuan dalam periode 2019-2024 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Rakyat” dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Lada Rakyat
2. Meningkatnya Produksi Kopi Robusta Rakyat
3. Meningkatnya Produksi Tebu Rakyat
4. Meningkatnya Produksi Karet Rakyat
5. Meningkatnya Produksi Kakao Rakyat
6. Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat
7. Meningkatnya Produksi Kelapa Dalam Rakyat
8. NTP Perkebunan Rakyat

Berikut dijelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti yang disajikan dalam tabel 10 (terlampir).

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25).

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Rakyat		Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)	810.493	822.650	834.990	847.515	860.228
		Meningkatnya Produksi Lada Rakyat	Jumlah Produksi Lada Rakyat	15.010	15.235	15.464	15.695	15.932
		Meningkatnya Produksi Kopi Robusta Rakyat	Jumlah Produksi Kopi Robusta Rakyat	114.324	116.039	117.780	119.546	121.340
		Meningkatnya Produksi Tebu Rakyat	Jumlah Produksi Tebu Rakyat	184.043	186.804	189.606	192.450	195.337
		Meningkatnya Produksi Karet Rakyat	Jumlah Produksi Karet Rakyat	159.874	162.272	164.706	167.177	169.684
		Meningkatnya Produksi Kakao Rakyat	Jumlah Produksi Kakao Rakyat	59.453	60.345	61.250	62.170	63.101
		Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Produksi Kelapa Sawit Rakyat	194.093	197.004	199.959	202.958	206.003
		Meningkatnya Produksi Kelapa Dalam Rakyat	Jumlah Produksi Kelapa Dalam Rakyat	83.696	84.951	86.225	87.519	88.831
		NTP Perkebunan Rakyat	Indeks NTP Perkebunan Rakyat	93,22	100,39	101,39	102,41	103,43



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2019-2024 perlu disusun strategi berupa langkah-langkah berisikan program-program indikatif. Strategi yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan mempengaruhi implementasi strategi.

Strategi yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berkelanjutan;
2. Optimasi peningkatan mutu, daya saing produk perkebunan dengan penerapan GMP;
3. Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra;
4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan;
5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas dan petani pekebun;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi;
7. Meningkatkan kinerja agribisnis perkebunan.

Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 didukung dengan suatu kebijakan yang

tepat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas petani dalam menjalankan usaha taninya dengan memanfaatkan Kartu Petani Berjaya (KPB).
2. Optimalisasi produksi tanaman dengan penerapan teknik budidaya tepat guna, penggunaan benih unggul, penerapan pupuk secara tepat, pengendalian hama penyakit secara terpadu.
3. Meningkatkan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan;
4. Kebijakan pengembangan komoditi berbasis klaster/kawasan dan peningkatan daya saing komoditas unggulan;
5. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan agroindustri di kawasan perkebunan;
6. Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit;
7. Mendorong penguatan SDM (petugas/pekebun) dan kelembagaan petani;
8. Mengembangkan pasar produk perkebunan melalui pola kemitraan dengan dunia usaha;
9. Penerapan standarisasi produk secara bertahap;
10. Mendorong percepatan inovasi teknologi perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan;
11. Mendorong percepatan inovasi teknologi pada pascapanen;
12. Peningkatan dan pengembangan pembiayaan usaha dan asuransi perkebunan;
13. Peningkatan dukungan melalui kebijakan dan regulasi.

Kebijakan ini harus dijalankan sebagai komitmen organisasi karena kebijakan akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 11. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan KEBIJAKAN (Tabel T-C.26)

VISI : Rakyat Lampung Berjaya			
MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produksi Lada Rakyat - Meningkatkan Produksi Kopi Robusta Rakyat - Meningkatkan Produksi Tebu Rakyat - Meningkatkan Produksi Karet Rakyat - Meningkatkan Produksi Kakao 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berkelanjutan; 2. Optimasi peningkatan mutu, daya saing produk perkebunan dengan penerapan GMP; 3. Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra; 4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan; 5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas dan petani pekebun; 6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi; 7. Meningkatkan kinerja agribisnis perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas petani dalam menjalankan usaha taninya dengan memanfaatkan Kartu Petani Berjaya (KPB). 2. Optimalisasi produksi tanaman dengan penerapan teknik budidaya tepat guna, penggunaan benih unggul, penerapan pupuk secara tepat, pengendalian hama penyakit secara terpadu. 3. Meningkatkan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan; 4. Kebijakan pengembangan komoditi berbasis klaster/kawasan dan peningkatan daya saing komoditas unggulan; 5. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan agroindustri di

	<p>Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Meningkatnya Produksi Kelapa Dalam Rakyat - NTP Perkebunan Rakyat 		<p>kawasan perkebunan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit; 7. Mendorong penguatan SDM (petugas/pekebun) dan kelembagaan petani; 8. Mengembangkan pasar produk perkebunan melalui pola kemitraan dengan dunia usaha; 9. Penerapan standarisasi produk secara bertahap; 10. Percepatan inovasi teknologi perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan; 11. Percepatan inovasi teknologi pada pascapanen; 12. Peningkatan dan pengembangan pembiayaan usaha dan asuransi perkebunan; 13. Peningkatan dukungan melalui kebijakan dan regulasi.
--	---	--	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan di dalam Dokumen Revisi Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019–2024 disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024. Struktur penyajian rencana program dan kegiatan disusun mengikuti urutan tujuan dan sasaran. Selain memperhatikan program dan kegiatan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, program dan kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019–2024 juga disusun dengan mencermati usul program dan kegiatan yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dengan kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024, diharapkan program dan kegiatan dapat tersusun secara partisipatif dan dapat diimplementasikan lebih operasional dan efektif. Melalui proses penyusunan Renstra diupayakan terbangun sinergi antar bidang secara internal dan terbangun sinkronisasi dengan program-program dari pemerintah pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi. Sinkronisasi program tersebut sangat penting, mengingat kemampuan pendanaan pembangunan daerah yang sangat terbatas.

Pada matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara lengkap tujuan, sasaran, program, kegiatan, capaian indikator kinerja, dan unit-unit kerja penanggung jawab program/kegiatan. Secara rinci uraian program dan kegiatan serta informasi lain yang terkait disajikan pada **Tabel 12.** dan **Tabel 13.** Rencana Program dan Indikator Kinerja (Terlampir).

Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan dan Pendapatan Perangkat daerah (Tabel T-C.27) Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Tahun 2020		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2020		
						Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1	Urusan Pilihan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (%)		2	2.120.000.000	1	Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Produktif	Jumlah Luas Areal Tanaman Tahunan dan Penyegar Produktif	100 Ha	250.000.000
								2	Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah Luas Areal Tanaman Semusim dan Rempah Produktif	100 Ha	250.000.000
								3	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Batang/Bibit Tanaman Perkebunan	10.000 Btg	250.000.000
								4	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	100 Ha	150.000.000
								5	Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI	Jumlah Luas Kebun UPTD BBKI	20 Ha	200.000.000
								6	Pengawasan Peredaran Mutu Benih	Jumlah Pengawasan Peredaran Mutu Benih di Kab/Kota	15 Kab/kota	75.000.000

								7	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kab/Kota	15 Kab/kota	75.000.000
								8	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	1 Kasus	50.000.000
								9	Operasional Brigade Proteksi Perkebunan	Jumlah Bulan Operasional Brigade Proteksi	12 Bulan	75.000.000
								10	Inventarisasi, Evaluasi, Penetapan Kebun Sumber Benih	Jumlah Sertifikasi Kebun Sumber Benih yang Terinventarisasi dan Terevaluasi	1 Keg	75.000.000
								11	Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	Jumlah Bulan Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	12 Bulan	100.000.000
								12	Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah Sertifikasi Benih	60 SMB	120.000.000
								13	Operasional Laboratorium Perlintan	Jumlah Bulan Operasional Laboratorium Perlintan	12 Bulan	100.000.000
								14	Operasional Laboratorium Kultur	Jumlah Bulan Operasional Laboratorium	12 Bulan	100.000.000

								Jaringan BBKI	Kultur Jaringan BBKI			
								15	Peningkatan Upaya Pengembangan dan Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan	Jumlah Kelompok Pengguna Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan	4 Klp	100.000.000
								16	Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pembangunan Kebun Plasma Nutfah Perkebunan	1 Keg	100.000.000
								17	Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan	Jumlah Kelompok Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan	2 Klp	50.000.000
												2.120.000.000
		2	Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase komoditas perkebunan yang meningkat nilai tambahnya (%)		2	1.000.000.000	1	Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan di Kab/Kota	15 Kab/kota	50.000.000
								2	Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	1 Unit	150.000.000
								3	Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	1 Unit	200.000.000

								4	Festival Komoditi Perkebunan	Jumlah Festival Panen Kopi dan Festival Panen Lada di Provinsi Lampung	2 Festival	600.000.000
												1.000.000.000
		3	Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	Persentase peningkatan kualitas bahan baku (DBH-CHT) yang sesuai standar (%)		2	2.400.000.000	1	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau(DBH-CHT)	Jumlah Kabupaten Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau (DBH-CHT)	5 Kab	250.000.000
								2	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau(DBH-CHT)	Jumlah Kelompok Tani Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)	20 KT	950.000.000
								3	Sinkronisasi dan Validasi Database Komoditas Tembakau (DBH-CHT)	Jumlah Dokumen Database Komoditas Tembakau	1 Dok	100.000.000
								4	Pengendalian OPT Tanaman Tembakau	Jumlah Luas Pengendalian OPT Tanaman Tembakau	50 Ha	200.000.000
								5	Penerapan Pembudidayaan Sesuai Good Agricultural Practices Tembakau	Jumlah Kelompok Tani Pembudidayaan Sesuai Good Agricultural Practices Tembakau	5 KT	300.000.000

							6	Penerapan Inovasi Teknis	Jumlah Petugas dan atau Petani dalam Penerapan Inovasi Teknis Tembakau	5 KT	500.000.000	
							7	Pengembangan Bahan Baku Tembakau untuk Substitusi Impor dan Promosi Ekspor	Jumlah Bahan Baku Tembakau untuk Substitusi Impor dan Promosi Ekspor	1 Keg	100.000.000	
											2.400.000.000	
		4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan	Persentase peningkatan prasarana dan sarana perkebunan (%)		2	3.400.000.000	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan	2 Paket	400.000.000
								2	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlantan	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1.000.000.000
								3	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BP2MB	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1.000.000.000
								4	Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BBKI	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1.000.000.000
												3.400.000.000
		5	Peningkatan Kelembagaan	Persentase peningkatan		2	825.000.000	1	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah Pengembangan dan	10 KT	350.000.000

			Perkebunan	kelas kelompok dalam penguatan kelembagaan (pemula, madya dan mandiri) (%)					Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Perkebun	Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Meningkatkan Pengetahuan Teknologi dan Kewirausahaan Petani		
								2	Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	1 Keg	100.000.000
								3	Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder Bidang Perkebunan	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kemitraan dengan Pelaku Utama Dengan Pelaku Usaha/Stake Holder Bidang Perkebunan	1 Keg	100.000.000
								4	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi	1 Keg	100.000.000
								5	Pengembangan Klaster Perkebunan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Klaster Perkebunan	1 Keg	100.000.000
								6	Inventarisasi dan Pendataan Pekebun Mendukung Kartu Tani Berjaya	Jumlah Inventarisasi dan Pendataan Pekebun Mendukung Kartu Tani Berjaya di	15 Kab/Kota	75.000.000

									Kab/Kota		
											825.000.000
					9.745.000.000						9.745.000.000
		URUSAN PENDUKUNG Non Urusan									
	6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan (%)		100	2.792.200.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	500.000.000
							2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	600.000.000
							3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	150.000.000
							4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	50.000.000
							5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	169.800.000
							6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan	12 Bulan	75.000.000

									Penggandaan			
								7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100.000.000
								8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	1 Kegiatan	80.000.000
								9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	80.000.000
								10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan	150.000.000
								11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Kali	400.000.000
								12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	4 Orang	86.400.000
								13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah Tenaga PTHL	15 Orang	351.000.000
												2.792.200.000
		7	Program Peningkatan	Persentase Peningkatan		100	700.000.000	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 Bulan	150.000.000

			Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				Kantor	Rutin/Berkala Gedung Kantor			
								2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Perizinan Kendaraan	12 Bulan	450.000.000
								3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	100.000.000
												700.000.000
		8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)		100	175.000.000	1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	150 orang	75.000.000
								2	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, Mutasi, Kenaikan Pangkat, dll	5 dokumen	50.000.000
								3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah ASN untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 orang	50.000.000
												175.000.000
		9	Program Perencanaan	Persentase Kesesuaian		100	1.450.000.000	1	Penyusunan Laporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	10	250.000.000

			Evaluasi Kinerja dan, Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)				Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja	Dokumen		
								2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000
								3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	500.000.000
								4	Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Jumlah Pengembangan E-Government OPD dan publikasi Pembangunan	1 Paket	500.000.000
								5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	1 Dokumen	100.000.000
							1.450.000.000					1.450.000.000
							5.117.200.000					5.117.200.000
							14.862.200.000					14.862.200.000

Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan dan Pendapatan Perangkat daerah (Tabel T-C.27) Tahun 2021-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		Agenda Kerja Utama
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Rakyat				Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	822.650 Ton		834.990 Ton		847.515 Ton		860.228 Ton		
Meningkatnya Produksi Lada Rakyat				Jumlah Produksi Lada Rakyat	15.235 Ton		15.464 Ton		15.695 Ton		15.932 Ton		
Meningkatnya Produksi Kopi Robusta Rakyat				Jumlah Produksi Kopi Robusta Rakyat	116.039 Ton		117.780 Ton		119.546 Ton		121.340 Ton		
Meningkatnya Produksi Tabu Rakyat				Jumlah Produksi Tebu	186.804 Ton		189.606 Ton		192.450 Ton		195.337 Ton		
Meningkatnya Produksi Karet Rakyat				Jumlah Produksi Karet Rakyat	162.272 Ton		164.706 Ton		167.177 Ton		169.684 Ton		

Meningkatnya Produksi Kakao Rakyat			Jumlah Produksi Kakao Rakyat	60.345 Ton		61.250 Ton		62.170 Ton		63.101 Ton	
Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	197.004 Ton		199.959 Ton		202.958 Ton		206.003 Ton	
Meningkatnya Produksi Kelapa Dalam Rakyat			Jumlah Produksi Kelapa Dalam	84.951 Ton		86.225 Ton		87.519 Ton		88.831 Ton	
	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	18.141.860.000	100 %	18.015.756.493 ,00	100 %	18.438.721.838	100 %	20.623.604.443
	3.27.1.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16 Dok	162.281.700	16 Dok	229.274.999,92	16 Dok	209.764.000	16 Dok	810.000.000
	3.27.1.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dok	102.517.700	6 Dok	150.000.000	6 Dok	150.000.000	6 Dok	550.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dok	63.276.000	5 Dok	100.000.000	5 Dok	100.000.000	5 Dok	350.000.000
	- Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Terlaksananya Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan								
		Jumlah Dokumen Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	1 Dok	39.241.700	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	200.000.000
3.27.1.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja								
		Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	10 Dok	59.764.000	10 Dok	79.274.999,92	10 Dok	59.764.000	10 Dok	260.000.000
3.27.1.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
		JUMLAH BULAN PELAYANAN ADMINISTRASI	12 Bulan	14.816.164.000	12 Bulan	14.631.396.988,08	12 Bulan	14.815.204.000	12 Bulan	14.991.520.000

		KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
3.27.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	14.792.480.000	12 Bulan	14.608.476.988,08	12 Bulan	14.791.520.000	12 Bulan	14.791.520.000
3.27.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Jumlah Bulan Layanan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	12 Bulan	23.684.000	12 Bulan	22.920.000	12 Bulan	23.684.000	12 Bulan	200.000.000
3.27.1.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH JUMLAH BULAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12 Bulan	109.237.000	12 Bulan	109.237.000	12 Bulan	109.237.000	12 Bulan	150.000.000
3.27.1.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur Jumlah Dokumen Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	5 Dok	36.320.000	5 Dok	36.320.000	5 Dok	36.320.000	5 Dok	50.000.000

3.27.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional												
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	150	Orang	72.917.000	150	Orang	72.917.000	150	Orang	72.917.000	150	Orang	100.000.000
3.27.1.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
		JUMLAH BULAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	12	Bulan	948.367.300	12	Bulan	863.453.000	12	Bulan	1.058.367.300	12	Bulan	1.641.084.443
3.27.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Dinas	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Listrik												
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Listrik	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	100.000.000
3.27.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	75.000.000	12	Bulan	75.000.000	12	Bulan	75.000.000	12	Bulan	100.000.000
3.27.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan												

	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan 34.800.000	12	Bulan 34.800.000	12	Bulan 34.800.000	12	Bulan 100.000.000
3.27.1.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Telaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor								
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan 173.322.300	12	Bulan 173.322.300	12	Bulan 173.322.300	12	Bulan 300.000.000
3.27.1.1.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Telaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat								
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan 50.000.000	12	Bulan 50.000.000	12	Bulan 160.000.000	12	Bulan 200.000.000
3.27.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Bulan Layanan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan 565.245.000	12	Bulan 480.330.700	12	Bulan 565.245.000	12	Bulan 841.084.443
3.27.1.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								

		JUMLAH BULAN LAYANAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 Bulan	1.605.810.000	12 Bulan	1.489.052.505	12 Bulan	1.606.770.000	12 Bulan	2.211.000.000
3.27.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	410.000.000						
3.27.1.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	660.160.000	12 Bulan	493.402.505	12 Bulan	660.160.000	12 Bulan	1.000.000.000
3.27.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana	12 Bulan	535.650.000	12 Bulan	585.650.000	12 Bulan	536.610.000	12 Bulan	801.000.000
			1 dokumen	65.379.500	1 dokumen	115.379.500	1 dokumen	66.339.500	1 dokumen	200.000.000

		Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset									
	- Penyediaan Jasa Administrasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi									
	Keuangan	Keuangan									
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa	12	Bulan	32.608.000	12	Bulan	32.608.000	12	Bulan	100.000.000
		Administrasi Keuangan									
	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran									
	Perkantoran										
		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran (PTHL Dinas)	15	Orang	351.000.000	15	Orang	351.000.000	15	Orang	351.000.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									
		Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa	12	Bulan	86.662.500	12	Bulan	86.662.500	12	Bulan	150.000.000
		Kebersihan Kantor									
3.27.1.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
		JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	12	Bulan	500.000.000	12	Bulan	693.342.000	12	Bulan	820.000.000

PEMERINTAHAN DAERAH														
3.27.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	333.342.000	12	Bulan	339.379.538	12	Bulan	345.000.000
3.27.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	75.000.000
3.27.1.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	200.000.000									
3.27.1.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau												

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya									
		Jumlah Bulan Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	200.000.000	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)	5 %	550.000.000	5 %	375.000.000	5 %	1.050.000.000	5 %	1.300.000.000	
3.27.02.1.01	KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN									
		JUMLAH LOKASI PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	15 Kab / Kota	50.000.000	15 Kab/ Kota	75.000.000	15 Kab/ Kota	350.000.000	15 Kab/ Kota	500.000.000	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana pendukung Pertanian									
		Jumlah Lokasi Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana pendukung Pertanian	15 Kab / Kota	50.000.000	15 Kab/ Kota	75.000.000	15 Kab/ Kota	200.000.000	15 Kab/ Kota	350.000.000	Mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur Mencegah dan Memberantas Peredaran Pupuk Palsu
	- Pengawasan Peredaran Pupuk	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk									

	Bersubsidi dan Pestisida	Bersubsidi dan Pestisida												
		Jumlah Lokasi Pengawasan Peredaran Pupuk	15	Kab / Kota	50.000.000	15	Kab/ Kota	75.000.000	15	Kab/ Kota	50.000.000	15	Kab/ Kota	200.000.000
		Bersubsidi dan Pestisida												
	- Peningkatan Upaya Pengembangan dan Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan	Terlaksananya Upaya Pengembangan dan Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan												
		Jumlah Kelompok Tani Penerima Manfaat Upaya pengembangan dan Penerapan Pupuk Organik dan Kompos pada Lahan Perkebunan	-	-	-	-	-	-	4	Kelompok	150.000.000	4	Kelompok	150.000.000
3.27.02.1.02	KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAN PENYEDIAAN SUMBER BENIH/ BIBIT PERKEBUNAN	MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN PENYEDIAAN SUMBER BENIH/ BIBIT PERKEBUNAN												
		JUMLAH LOKASI PENGAWASAN MUTU DAN PENYEDIAAN SUMBER BENIH/ BIBIT PERKEBUNAN	15	Kab / Kota	500.000.000	15	Kab/ Kota	300.000.000	15	Kab/ Kota	700.000.000	15	Kab/ Kota	800.000.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan												
		Jumlah Sertifikat Mutu Benih Tanaman yang	60	Sertifikat	100.000.000									

		diterbitkan													
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan	15	Kab / kota	400.000.000	15	Kab/ kota	200.000.000	15	Kab/ kota	600.000.000	15	Kab/ kota	700.000.000	Mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur Daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya
	- Pengawasan Peredaran Mutu Benih	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Mutu Benih	15	Kab / kota	100.000.000	15	Kab/ kota	150.000.000	15	Kab/ kota	150.000.000	15	Kab/ kota	150.000.000	
	- Inventarisasi, Evaluasi, Penetapan Kebun Sumber Benih	Terlaksananya Inventarisasi, Evaluasi, Penetapan Kebun Sumber Benih	5	Kebun Sumber Benih	50.000.000	5	Kebun Sumber Benih	50.000.000	5	Kebun Sumber Benih	100.000.000	5	Kebun Sumber Benih	150.000.000	
	- Pembibitan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pembibitan Tanaman Perkebunan	10.000	Batang	250.000.000	-	-	-	10.000	Batang	250.000.000	10.000	Batang	300.000.000	

	- Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan Jumlah Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan	- -	-	- -	-	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan (%)	3 %	6.611.891.093	3 %	6.170.000.000	3 %	10.570.000.000	3 %	10.720.000.000	
3.27.03.1.01	KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PENATAAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	3 %	6.611.891.093	3 %	6.170.000.000	3 %	10.570.000.000	3 %	10.720.000.000	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	400 Ha	3.185.009.093	646 Ha	5.240.000.000	646 Ha	6.790.000.000	646 Ha	6.890.000.000	Mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper).

		Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan	663 Unit	1.400.000.000	9 Unit	740.000.000	9 Unit	490.000.000	9 Unit	490.000.000
	- Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terlaksananya Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar								
		Jumlah Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	100 Ha	400.000.000	170 Ha	1.110.000.000	170 Ha	1.110.000.000	170 Ha	1.210.000.000
	- Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah								
		Jumlah Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah	300 Ha	1.385.009.093	476 Ha	3.390.000.000	476 Ha	5.190.000.000	476 Ha	5.190.000.000
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium pertanian	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian								
		Jumlah Bulan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000
	- Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	Terlaksananya Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB								

		Jumlah Bulan Operasional Laboratorium Mutu	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000
		Benih UPTD BP2MB												
	- Operasional Laboratorium UPTD	Terlaksananya Operasional Laboratorium UPTD												
	Perlintan	Perlintan												
		Jumlah Bulan Operasional Laboratorium Mutu	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000
		Benih UPTD Perlintan												
	- Operasional Laboratorium	Terlaksananya Operasional Laboratorium Kultur												
	Kultur Jaringan BBI	Jaringan BBI												
		Jumlah Bulan Operasional Laboratorium Kultur	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000
		Jaringan BBI												
3.27.03.1.01.10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya												
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2	Keg	3.076.882.000	1	Keg	480.000.000	4	Keg	3.480.000.000	4	Keg	3.530.000.000
	- Pembangunan/ Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu	Terlaksananya Pembangunan/ Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu												

	Benih (BP2MB) (DAK)	Benih (BP2MB) (DAK)												
		Jumlah Pembangunan/ Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih	1	Keg	2.776.882.000	-	-	-	-	-	-			
		(BP2MB) (DAK)												
	- Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlinteran	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlinteran												
		Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlinteran	-	-	-	-	-	-	1	Keg	1.000.000.000	1	Keg	1.000.000.000
	- Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BP2MB	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BP2MB												
		Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BP2MB	-	-	-	-	-	-	1	Keg	1.000.000.000	1	Keg	1.000.000.000
	- Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BBKI	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BBKI												
		Jumlah Kegiatan Pembangunan,	-	-	-	-	-	-	1	Keg	1.000.000.000	1	Keg	1.000.000.000

	- Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI	Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BBKI Terlaksananya Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI Jumlah Luasan Kebun UPTD BBKI yang terpelihara	20 Ha	300.000.000	20 Ha	480.000.000	20 Ha	480.000.000	20 Ha	530.000.000	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit (%)	25 %	861.022.500	25 %	400.000.000	25 %	950.000.000	25 %	950.000.000	
3.27.05.1.01	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI JUMLAH LUASAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG PERKEBUNAN	150 Ha	861.022.500	150 Ha	400.000.000	300 Ha	950.000.000	300 Ha	950.000.000	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pengendalian Organisme	150 Ha	800.000.000	150 Ha	300.000.000	300 Ha	850.000.000	300 Ha	850.000.000	Mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur Daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya

		Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan								
	- Pengendalian OPT Tanaman	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman								
	Tembakau (DBHCHT)	Tembakau (DBHCHT)								
		Jumlah Luasan Pengendalian OPT Tanaman	50 Ha	50.000.000	50 Ha	50.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000
		Tembakau								
	- Pengendalian OPT Tanaman	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman								
	Perkebunan	Perkebunan								
		Jumlah Luasan Pengendalian OPT Tanaman	100 Ha	650.000.000	100 Ha	150.000.000	250 Ha	500.000.000	250 Ha	500.000.000
		Perkebunan								
	- Operasional Brigade	Terlaksananya Operasional Brigade Proteksi								
	Proteksi Perkebunan	Perkebunan								
		Jumlah Bulan Operasional Brigade Proteksi	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000
		Perkebunan								
3.27.05.1.01.03	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								

		Jumlah Kasus Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Kasus	61.022.500	1 Kasus	100.000.000	1 Kasus	100.000.000	1 Kasus	100.000.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	30 %	175.000.000	30 %	343.000.000	30 %	350.000.000	30 %	400.000.000
3.27.06.1.01	KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
		JUMLAH PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	15 PBN / PBS	175.000.000	15 PBN/ PBS	343.000.000	15 PBN/ PBS	350.000.000	15 PBN/ PBS	400.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian								
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	2 Kegiatan	175.000.000	2 Kegiatan	343.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	400.000.000
	- Penilaian Usaha Perkebunan	Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan								
		Jumlah Penilaian Usaha Perkebunan	1 Keg	125.000.000	1 Keg	193.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000

		- Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha/ Stake Holder Bidang Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha/ Stake Holder Bidang Perkebunan								
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha/ Stake Holder Bidang Perkebunan	1 Keg	50.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000
NTP Perkebunan Rakyat			Indeks NTP Perkebunan Rakyat	100,39 Indeks		101,39 Indeks		102,41 Indeks		103,43 Indeks	
	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan (%)	20 %	1.968.617.500	20 %	4.439.710.250	20 %	3.118.617.500	20 %	3.418.617.500
	3.27.07.1.02	KEGIATAN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN								
			JUMLAH LOKASI PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	15 Kab/ Kota	1.668.617.500	15 Kab/ Kota	3.889.710.250	15 Kab/ Kota	2.418.617.500	15 Kab/ Kota	2.718.617.500
	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis								

Mendukung Agenda

			Jumlah Kelompok Tani Penerapan Pembudidayaan sesuai Good Agricultural Practices Tembakau (DBH-CHT)	5	KT	350.000.000	5	KT	421.712.050	5	KT	100.000.000	5	KT	100.000.000
		- Penerapan Inovasi Teknis (DBH-CHT)	Terlaksananya Penerapan Inovasi Teknis (DBH-CHT)												
			Jumlah Kelompok Tani Penerapan Inovasi Teknis (DBHCHT)	5	KT	368.617.500	5	KT	148.617.500	5	KT	168.617.500	5	KT	168.617.500
		- Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan												
			Jumlah Lokasi Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan	15	Kab / Kota	100.000.000	15	Kab/ Kota	100.000.000	15	Kab/ Kota	100.000.000	15	Kab/ Kota	100.000.000
		- Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	Terlaksananya Pengolahan Pasca Panen Perkebunan												
			Jumlah Unit Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	3	Unit	400.000.000	3	Unit	1.944.380.700	3	Unit	400.000.000	3	Unit	400.000.000
		- Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Terlaksananya Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan												
			Jumlah Penerima Manfaat Pengolahan Hasil	20	Orang	100.000.000	20	Orang	75.000.000	20	Orang	100.000.000	20	Orang	100.000.000

	Database Komoditas Tembakau (DBH-CHT)	Database Komoditas Tembakau (DBH-CHT)												
		Jumlah Dokumen Database Komoditas Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan												
		Jumlah Penerima Manfaat Bimbingan Teknis Teknologi Perkebunan	-	-	-	-	2	KT	50.000.000	2	KT	200.000.000		
3.27.07.1.03	KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN												
		JUMLAH PENERIMA MANFAAT PENGEMBANGAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	30	KT	300.000.000	30	KT	550.000.000	30	KT	700.000.000	30	KT	700.000.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani												
		Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Kegiatan	12	KT	300.000.000	12	KT	550.000.000	17	KT	700.000.000	17	KT	700.000.000

			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi												
			Petani												
	- Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Perkebun		Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Perkebun												
			Jumlah Penerima Manfaat Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Perkebun	10	KT	100.000.000	10	KT	100.000.000	15	KT	350.000.000	15	KT	350.000.000
	- Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi		Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi												
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1	Keg	50.000.000	1	Keg	350.000.000	1	Keg	100.000.000	1	Keg	100.000.000
	- Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)		Terlaksananya Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)												
			Jumlah Penerima Manfaat Penumbuhan dan Jumlah Penerima Manfaat Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT), Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA)	2	KT	150.000.000	2	KT	100.000.000	2	KT	150.000.000	2	KT	150.000.000

			- Pengembangan Klaster Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Klaster Perkebunan									
				Jumlah Kegiatan Pengembangan Klaster Perkebunan	- -	-	- -	-	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	
JUMLAH						28.308.391.093		29.743.466.743		34.477.339.338		37.412.221.943	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan tolok ukur untuk menilai capaian hasil program pembangunan Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Berikut indikator kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Tabel 14). Indikator kinerja tersebut diturunkan secara langsung dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tabel 14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C 28).

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun (ton)					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)	781.664	810.493	822.650	834.990	847.515	860.228	860.228
	1. Jumlah Produksi Lada Rakyat	14.401	15.010	15.235	15.464	15.695	15.932	15.932
	2. Jumlah Produksi Kopi Robusta Rakyat	114.237	114.324	116.039	117.780	119.546	121.340	121.340
	3. Jumlah Produksi Tebu Rakyat	170.020	184.043	186.804	189.606	192.450	195.337	195.337
	4. Jumlah Produksi Karet Rakyat	151.122	159.874	162.272	164.706	167.177	169.684	169.684
	5. Jumlah Produksi Kakao Rakyat	57.968	59.453	60.345	61.250	62.170	63.101	63.101
	6. Jumlah Produksi Kelapa Sawit Rakyat	190.538	194.093	197.004	199.959	202.958	206.003	206.003
	7. Jumlah Produksi Kelapa Dalam Rakyat	83.378	83.696	84.951	86.225	87.519	88.831	88.831
	8. NTP Perkebunan Rakyat	93,22	93,22	100,39	101,39	102,41	103,43	103,43

Tabel 15. Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Rencana Kinerja Tahun (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)	810.493	822.650	834.990	847.515	860.228
2. Indeks NTP Perkebunan Rakyat	93,22	100,39	101,39	102,41	103,43

Untuk mencapai Tujuan dituangkan dalam bentuk indikator sasaran strategis yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (7 komoditi utama)
2. NTP Perkebunan Rakyat

Proyeksi Produktivitas Berdasarkan Komoditi Unggulan Perkebunan

Tabel 16 . Proyeksi Produktivitas Komoditi Unggulan Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) Provinsi Lampung 2020 - 2024

Komoditi	2020 (Kg/Ha)	2021 (Kg/Ha)	2022 (Kg/Ha)	2023 (Kg/Ha)	2024 (Kg/Ha)
Lada	490	515	540	567	596
Kopi Robusta	860	903	948	995	1.045
Tebu	6.733	6.867	7.005	7.145	7.288
Karet	1.404	1.474	1.538	1.625	1.706
Kakao	952	1.000	1.050	1.102	1.157
Kelapa Sawit	2.508	2.633	2.765	2.903	3.048
Kelapa Dalam	1.269	1.332	1.399	1.469	1.542

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Rakyat		Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)	810.493	822.650	834.990	847.515	860.228
		Meningkatnya Produksi Lada Rakyat	Jumlah Produksi Lada Rakyat	15.010	15.235	15.464	15.695	15.932
		Meningkatnya Produksi Kopi Robusta Rakyat	Jumlah Produksi Kopi Robusta Rakyat	114.324	116.039	117.780	119.546	121.340
		Meningkatnya Produksi Tebu Rakyat	Jumlah Produksi Tebu Rakyat	184.043	186.804	189.606	192.450	195.337
		Meningkatnya Produksi Karet Rakyat	Jumlah Produksi Karet Rakyat	159.874	162.272	164.706	167.177	69.684
		Meningkatnya Produksi Kakao Rakyat	Jumlah Produksi Kakao Rakyat	59.453	60.345	61.250	62.170	63.101
		Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Produksi Kelapa Sawit Rakyat	194.093	197.004	199.959	202.958	206.003
		Meningkatnya Produksi Kelapa Dalam Rakyat	Jumlah Produksi Kelapa Dalam Rakyat	83.696	84.951	86.225	87.519	88.831
		NTP Perkebunan Rakyat	Indeks NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)	93,22	100,39	101,39	102,41	103,43



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas. Dokumen revisi rencana strategis merupakan panduan bagi Dinas Perkebunan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2019-2024.

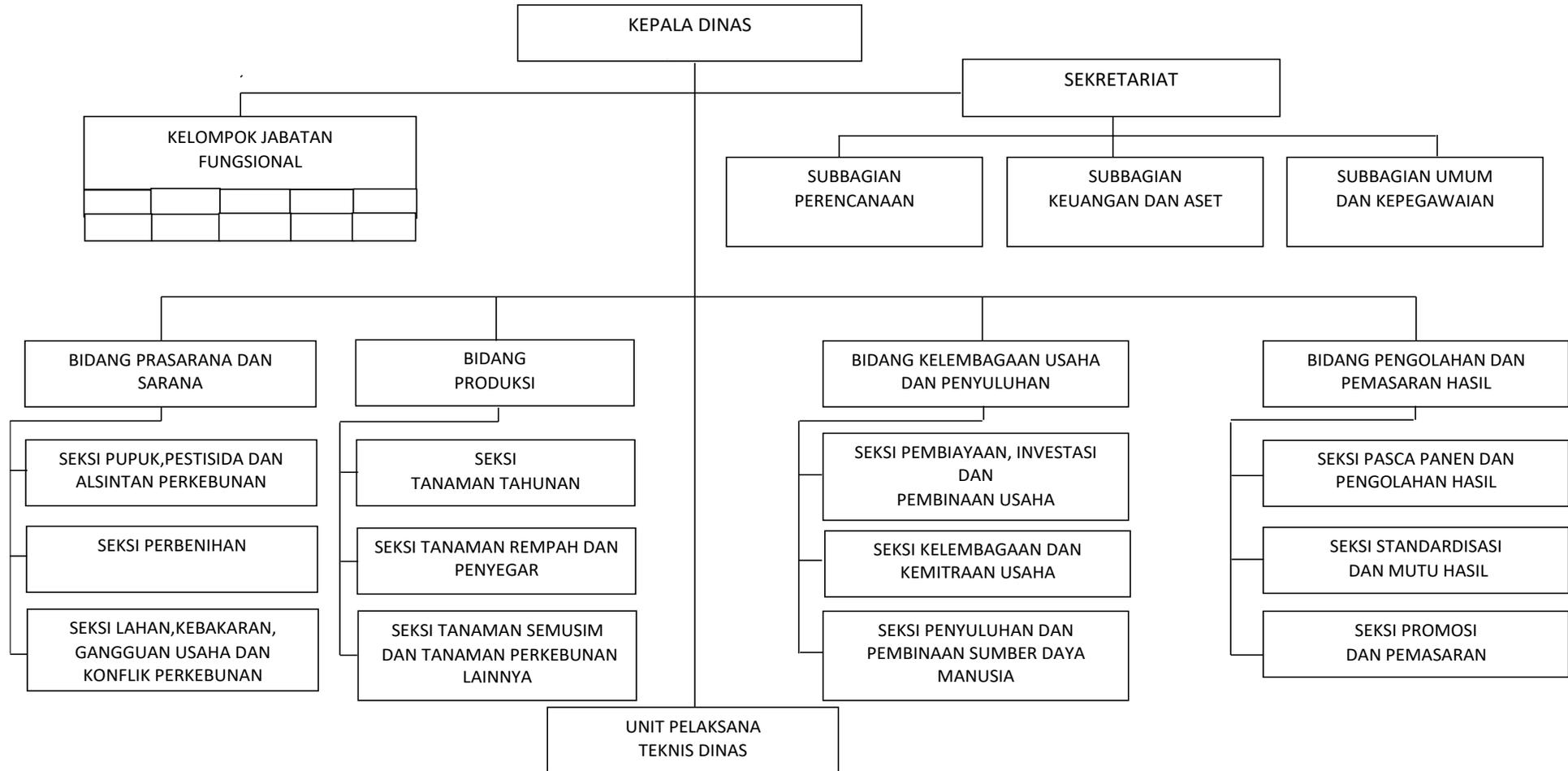
Menyadari bahwa pencapaian pembangunan perkebunan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas para penyelenggara di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Lampung disertai dengan koordinasi dengan pelaksana di Kabupaten/Kota dan stakeholder/pemangku kepentingan maka tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dapat dicapai.

Periodisasi Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 adalah sesuai dengan Periodisasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019–2024. Pada saat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2024 – 2029 belum tersusun, maka Renstra Tahun 2019–2024 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perkebunan tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

LAMPIRAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA
 PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG



Tabel. 12 Rencana Program, Kegiatan dan Pendapatan Perangkat Daerah (Tabel T-C.27)

Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan (Pada RENSTRA PD) Provinsi Lampung Tahun 2020
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Tahun 2020		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2020	
						Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (%)		2	2,120,000,000	1 Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah Luas Areal Tanaman Tahunan dan Penyegar	100 Ha	250,000,000
								2 Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah Luas Areal Tanaman Semusim dan Rempah	100 Ha	250,000,000
								3 Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Batang/Bibit Tanaman Perkebunan	10.000 Btg	250,000,000
								4 Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	100 Ha	150,000,000
								5 Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI	Jumlah Luas Kebun UPTD BBKI	20 Ha	200,000,000
								6 Pengawasan Peredaran Mutu Benih	Jumlah Pengawasan Peredaran Mutu Benih di Kab/Kota	15 Kab/kota	75,000,000
								7 Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kab/Kota	15 Kab/kota	75,000,000
								8 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus Penanganan Gangguan	1 Kasus	50,000,000

									Usaha Perkebunan		
								9 Operasional Brigade	Jumlah Bulan	12 Bulan	75,000,000
								Proteksi Perkebunan	Operasional Brigade		
									Proteksi		
								10 Inventarisasi, Evaluasi,	Jumlah Sertifikasi	1 Keg	75,000,000
								Penetapan Kebun Sumber	Kebun Sumber Benih		
								Benih	yang Terinventarisasi		
									dan Terevaluasi		
								11 Operasional	Jumlah Bulan	12 Bulan	100,000,000
								Laboratorium Mutu Benih	Operasional		
								UPTD BP2MB	Laboratorium Mutu		
									Benih UPTD BP2MB		
								12 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikasi	60 SMB	120,000,000
								Tanaman Perkebunan	Benih		
								13 Operasional	Jumlah Bulan	12 Bulan	100,000,000
								Laboratorium Perlintan	Operasional		
									Laboratorium		
									Perlntan		
								14 Operasional	Jumlah Bulan	12 Bulan	100,000,000
								Laboratorium Kultur	Operasional		
								Jaringan BBKI	Laboratorium Kultur		
									Jaringan BBKI		
								15 Peningkatan Upaya	Jumlah Kelompok	4 Klp	100,000,000
								Pengembangan dan	Pengguna Penerapan		
								Penerapan Pupuk Organik	Pupuk Organik dan		
								dan Kompos pada Lahan	Kompos pada Lahan		
								Perkebunan	Perkebunan		
								16 Pembangunan Kebun	Jumlah Pembangunan	1 Keg	100,000,000
								Koleksi Tanaman	Kebun Plasma Nutfah		
								Perkebunan	Perkebunan		
								17 Bimbingan Teknis	Jumlah Kelompok	2 Klp	50,000,000
								Teknologi Perkebunan	Bimbingan Teknis		
									Teknologi Perkebunan		

							5 Penerapan	Jumlah Kelompok Tani	5 KT	300,000,000
							Pembudidayaan Sesuai	Pembudidayaan		
							Good Agricultural	Sesuai Good		
							Practices Tembakau	Agricultural Practices		
								Tembakau		
							6 Penerapan Inovasi Teknis	Jumlah Petugas dan	5 KT	500,000,000
								atau Petani dalam		
								Penerapan Inovasi		
								Teknis Tembakau		
							7 Pengembangan Bahan	Jumlah Bahan Baku	1 Keg	100,000,000
							Baku Tembakau untuk	Tembakau untuk		
							Substitusi Impor dan	Substitusi Impor dan		
							Promosi Ekspor	Promosi Ekspor		
										2,400,000,000
		4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan	Persentase peningkatan prasarana dan sarana perkebunan (%)	2	3,400,000,000	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan	2 Paket	400,000,000
							2 Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perlintan	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1,000,000,000
							3 Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BP2MB	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1,000,000,000
							4 Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD BBKI	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 Keg	1,000,000,000
										3,400,000,000
		5	Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	Persentase peningkatan kelas kelompok dalam	2	825,000,000	1 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan	Jumlah Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani,	10 KT	350,000,000

				penguatan			Pemberdayaan Petani	Gapoktan dan		
				kelembagaan			Perkebun	Meningkatnya		
				(pemula, madya				Pengetahuan		
				dan mandiri) (%)				Teknologi dan		
								Kewirausahaan Petani		
							2 Penilaian Usaha	Jumlah Kegiatan	1 Keg	100,000,000
							Perkebunan	Penilaian Usaha		
								Perkebunan		
							3 Pengembangan dan	Jumlah Kegiatan	1 Keg	100,000,000
							Penguatan Kemitraan	Pengembangan dan		
							Pelaku Utama Dengan	Penguatan Kemitraan		
							Pelaku Usaha/Stake	dengan Pelaku Utama		
							Holder Bidang	Dengan Pelaku		
							Perkebunan	Usaha/Stake Holder		
								Bidang Perkebunan		
							4 Pengembangan dan	Jumlah Kegiatan	1 Keg	100,000,000
							Penguatan Ekonomi	Pengembangan dan		
							Petani Berbasis	Penguatan Ekonomi		
							Korporasi	Petani Berbasis		
								Korporasi		
							5 Pengembangan Klaster	Jumlah Kegiatan	1 Keg	100,000,000
							Perkebunan	Pengembangan Klaster		
								Perkebunan		
							6 Inventarisasi dan	Jumlah Inventarisasi	15 Kab/Kota	75,000,000
							Pendataan Pekebun	dan Pendataan		
							Mendukung Kartu Tani	Pekebun Mendukung		
							Berjaya	Kartu Tani Berjaya di		
								Kab/Kota		
										825,000,000
						9,745,000,000				9,745,000,000
			URUSAN PENDUKUNG							
			Non Urusan							
		6	Program Pelayanan	Persentase	100	2,792,200,000	1 Penyediaan Jasa	Jumlah Bulan	12 Bulan	500,000,000
			Administrasi	Peningkatan			Komunikasi, Sumber	Penyediaan		
			Perkantoran	Pelayanan			Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber		
				Administrasi				Daya Air dan Listrik		

				Perkantoran yang dilaksanakan (%)							
								2 Penyediaan Jasa	Jumlah Bulan	12 Bulan	600,000,000
								Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa		
									Administrasi		
									Keuangan		
								3 Penyediaan Jasa	Jumlah Bulan	12 Bulan	150,000,000
								Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa		
									Kebersihan Kantor		
								4 Penyediaan Jasa dan	Jumlah Bulan	12 Bulan	50,000,000
								Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa dan		
									Perbaikan Peralatan		
									Kerja		
								5 Penyediaan Alat Tulis	Jumlah Bulan	12 Bulan	169,800,000
								Kantor	Penyediaan Alat Tulis		
									Kantor		
								6 Penyediaan Barang	Jumlah Bulan	12 Bulan	75,000,000
								Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang		
									Cetakan dan		
									Penggandaan		
								7 Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Bulan	12 Bulan	100,000,000
								Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan		
									dan Perlengkapan		
									Kantor		
								8 Penyediaan Peralatan	Jumlah Penyediaan	1 Kegiatan	80,000,000
								Rumah Tangga dan	Peralatan Rumah		
								Peralatan Listrik	Tangga dan Peralatan		
									Listrik		
								9 Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bulan	12 Bulan	80,000,000
								dan Peraturan	Penyediaan Bahan		
								Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan		
									Perundang-Undangan		
								10 Penyediaan Makanan dan	Jumlah Bulan	12 Bulan	150,000,000
								Minuman	Penyediaan Makan dan		
									Minum		

								11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Kali	400,000,000
								12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	4 Orang	86,400,000
								13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah Tenaga PTHL	15 Orang	351,000,000
											2,792,200,000
		7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	700,000,000	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	150,000,000	
							2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Perizinan Kendaraan	12 Bulan	450,000,000	
							3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	100,000,000	
											700,000,000
		8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)	100	175,000,000	1 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	150 orang	75,000,000	
							2 Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, Mutasi, Kenaikan Pangkat, dll	5 dokumen	50,000,000	
							3 Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah ASN untuk	100 orang	50,000,000	

							Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian			
								Dinas Beserta			
								Perlengkapannya			
										175,000,000	
		9	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)		100	1,450,000,000	1 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	10 Dokumen	250,000,000
								2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	1 Dokumen	100,000,000
								3 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	500,000,000
								4 Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Jumlah Pengembangan E-Government OPD dan publikasi Pembangunan	1 Paket	500,000,000
								5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	1 Dokumen	100,000,000
											1,450,000,000
							5,117,200,000				5,117,200,000
							14,862,200,000				14,862,200,000

	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	target		
Sarana	795,000,000	175,000,000	175,000,000	1		
			620,000,000	120,000,000	1	
				500,000,000	4	
Prasarana	4,400,000,000	4,400,000,000	900,000,000	1	200	
			3,200,000,000	10		
			300,000,000	7		
Bencana	475,000,000	475,000,000	425,000,000	1		
			50,000,000	3		
Perizinan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	3		
Penyuluhan	3,875,000,000	2,375,000,000	2,375,000,000	1		
			1,500,000,000	1,500,000,000	1	
	9,745,000,000					
Penunjang	17,587,060,946	1,250,000,000	1,000,000,000	1	1	
			250,000,000	2		
	5,117,200,000	12,569,860,946	12,469,860,946	1	2	
			100,000,000	2		
		175,000,000	100,000,000	1	3	
			75,000,000	2		
		954,800,000	80,000,000	3	4	
			75,000,000	5		
			80,000,000	6		

	169,800,000	7	
	150,000,000	8	
	400,000,000	9	
1,887,400,000	500,000,000	2	5
	100,000,000	3	
	1,287,400,000	4	
750,000,000	450,000,000	2	6
	50,000,000	6	
	150,000,000	9	
	100,000,000	11	

27,332,060,946